



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 70 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 96
TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI
DAN USAHA KECIL MENENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 96 Tahun 2017 telah diatur mengenai analisis jabatan dan analisis beban kerja pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kalimantan Utara;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi dan kepastian penataan pegawai pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kalimantan Utara, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 96 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;

14. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 16).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 96 TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 96 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 96), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Lampiran diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
2. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 5A, yang selengkapny berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

- (1) Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagai prasyarat untuk menyusun peta jabatan, uraian jabatan, serta jumlah kebutuhan PNS.
- (2) Peta jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



IRIANTO LAMBRIE

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.




Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



IRIANTO LAMBRIE

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	DR.H.SURIANSYAH, M.AP	SEKRETARIS DAERAH	
2	Drs. H. ZAINUDDIN HZ, M.Si	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
3	ARMAN JAUHARI, SH	PLt. KARO HUKUM	
4	Drs. H. ABDUL MAQJID S, M.Si	KARO ORGANISASI	

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019


GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR 70

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR 20

No.		
1	Drs. H. Zaimuddin H2, Msi	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
2	ARMAN JAUHARI, SH	PLt. KARD HUKUM
3	Drs. H. ABDUL MAJID S, M.Si	KARD ORGANISASI



LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 70 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR
96 TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN
KERJA PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN
USAHA KECIL MENENGAH

HASIL ANALISA JABATAN DAN ANALISA BEBAN KERJA PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

NO.	NAMA JABATAN	KEBUTUHAN PEGAWAI					KETERANGAN
		JABATAN PIMPINAN TINGGI	JABATAN ADMINISTRATOR	JABATAN PENGAWAS	JABATAN PELAKSANA	JABATAN FUNGSIONAL	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Kepala Dinas	1					
	1. Sekretaris		1				
	a. Kepala Sub Bagian Perencanaan			1			
	1) Analis Perencanaan				1		
	2) Analis Data dan Informasi				1		
	3) Pengolah Data Perencanaan Penganggaran				-		
	b. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian			1			
	1) Pengadministrasi Kepegawaian				-		
	2) Pengadministrasi Umum				2		
	3) Pengemudi				-		
	4) Analis Kebijakan Barang Milik Negara				1		
	c. Kepala Sub Bagian Keuangan			1			
	1) Bendahara				1		
	2) Verifikator Keuangan				1		

	3) Pengadministrasi Keuangan				2		
	4) Pranata Laporan Keuangan				-		
	5) Analisis Pengelolaan Keuangan				2		
	2. Kepala Bidang Industri		1				
	a. Kepala Seksi Industri Kecil dan Menengah			1			
	1) Analisis Proses Akreditasi Industri				2		
	2) Pengelola Sarana Perindustrian				-		
	3) Analisis Proses Akreditasi Lembaga Sertifikasi Produk, Personel, Halal, Pangan Organik				1		
	b. Kepala Seksi Industri Agro Dan Kimia			1			
	1) Analisis Pengembangan Usaha Agroindustri				1		
	2) Analisis Industri Dan Pencegahan Pencemaran				-		
	3) Analisis Proses Uji Banding				1		
1	2	3	4	5	6	7	8
	c. Kepala Seksi Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Dan Elektronika			1			
	1) Analisis Teknologi Industri				2		
	2) Pengelola Sarana Perindustrian				1		
	3) Analisis Proses Uji Komparasi				1		
	3. Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri		1				
	a. Kepala Seksi Bina Pasar Dan Distribusi			1			
	1) Analisis Pengembangan Pasar				1		
	2) Penyusun Rencana Analisis Pasar Dalam Negeri				1		
	3) Pengadministrasi Pengamanan dan Perlindungan Akses Pasar				1		
	b. Kepala Seksi Perlindungan Konsumen Dan Pengawasan Barang			1			
	1) Analisis Mutu Produk				-		
	2) Pengelola Fasilitasi Dan Mediasi Perlindungan Konsumen				-		

	c. Kepala Seksi Bina Usaha Dan Pelaku Distribusi			1			
	1) Pengelola Distribusi Dan Pemasaran				-		
	2) Penyusun Rencana Jaringan Distribusi				-		
	4. Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri		1				
	a. Kepala Seksi Ekspor dan Impor			1			
	1) Analis Perdagangan				-		
	2) Pengelola Fasilitasi Dan Mediasi Pembangunan Usaha Perdagangan Ekspor-Impor				-		
	b. Kepala Seksi Promosi Dan Pengembangan Perdagangan Internasional			1			
	1) Fasilitator Promosi				-		
	2) Penyusun Rencana Analisis Pasar Luar Negeri				1		
	c. Kepala Seksi Kerjasama Perdagangan Luar Negeri				-		
	1) Penyusun Rencana Informasi Pasar Luar Negeri				-		
	2) Analis Kerjasama Bilateral Dan Regional				3		
	5. Kepala Bidang Koperasi dan UKM		1				
	a. Kepala Seksi Bina Lembaga Koperasi Dan UKM, Restrukturisasi dan Pengawasan			1			
	1) Analis Pengawasan				2		
	2) Analis Koperasi				1		
	b. Kepala Seksi Fasilitasi Pembiayaan Dan Permodalan			1			
	1) Pengelola Permodalan Koperasi Dan Usaha Kecil, Mikro Dan Menengah				-		
	2) Analis Kerjasama Dan Permodalan				1		
	c. Kepala Seksi Produksi Usaha Dan Pemasaran			1			
	1) Analis Pemasaran Dan Kerjasama				1		
	2) Fasilitator Kewirausahaan				1		

6. Penguji Mutu Barang Pertama					4	
7. Pengawas Koperasi Pertama					-	
Jumlah	1	5	14	33	4	
Jumlah Total	57					

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,






IRIANTO LAMBRIE

6. Penguji Mutu Barang Pertama					4	
7. Pengawas Koperasi Pertama					-	
Jumlah	1	5	14	33	4	
Jumlah Total			57			

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,


IRIANTO LAMBRIE

No.			
1	DR. H. SURIAHSYAH, M.AP	SEKRETARIS DAERAH	
2	DRS. H. ZAINUDDIN HZ, M.Si	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
3	ARMAN JAUHARI, SH	PLT. KARD HUKUM	
4	DRS. H. ABDUL MAQJID S, M.Si	KARD ORGANISASI	

6. Penguji Mutu Barang Pertama					4	
7. Pengawas Koperasi Pertama					-	
Jumlah	1	5	14	33	4	
Jumlah Total	57					

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR 70

6. Penguji Mutu Barang Pertama					4	
7. Pengawas Koperasi Pertama					-	
Jumlah	1	5	14	33	4	
Jumlah Total						57

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR 70

1	Drs. H. ZAIMUODIH HZ, M.Si	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
2	ARMAN JAUHARI, S.H	PLt. KARD HUKUM
3	Drs. H. ABDUL MADJID S, M. Si	KARD ORGANISASI



PETA JABATAN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN USAHA KECIL MENENGAH

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah
Kelas 15

Rekapitulasi	Jumlah		
	B	K	+/-
Eselon II	1	1	0
Eselon III	5	5	0
Eselon IV	14	15	-1
JFT	4	6	-2
JFU	33	52	-19
Kurang	57	79	-22

Beban Kerja:
1. ...
2. ...

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 70 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR
96 TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN
KERJA PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN
USAHA KECIL MENENGAH

Jabatan	KLS	B	K	-/+
Penguji Mutu Barang Pertama	8	4	4	0
Pengawas Koperasi Pertama	8	0	2	-2
		4	6	-2

Sekretaris Kelas 12				
Kepala Sub Bagian Perencanaan Kelas 9				
Jabatan	KLS	B	K	-/+
Analisis Perencanaan	7	1	1	0
Pengolah Data Perencanaan Penganggaran	6	0	1	-1
Analisis Data dan Informasi	7	1	1	0
		2	3	-1
Kepala Sub Bagian Urum Dan Kepegawaian Kelas 9				
Jabatan	KLS	B	K	-/+
Pengadministrasi Kepegawaian	5	0	1	-1
Pengadministrasi Umum	5	2	2	0
Pengemudi	3	0	1	-1
Analisis Barang Milik Negara	7	1	1	0
		3	5	-2
Kepala Sub Bagian Keuangan Kelas 9				
Jabatan	KLS	B	K	-/+
Bendahara	7	1	2	-1
Verifikator Keuangan	6	1	2	-1
Pengadministrasi Keuangan	5	2	2	0
Pranata Laporan Keuangan	6	0	1	-1
Analisis Pengelolaan Keuangan	7	2	2	0
		6	9	-3

Kepala Bidang Industri Kelas 11				
Kepala Seksi Industri Kecil Dan Menengah Kelas 9				
Jabatan	KLS	B	K	-/+
Analisis Proses Akreditasi Industri	7	2	2	0
Pengelola Sarana Perindustrian	6	0	1	-1
Analisis Proses Akreditasi Lembaga Sertifikasi Produk, Personel, Halal, Pangan Organik	7	1	1	0
		3	4	-1
Kepala Seksi Industri Agro Dan Kimia Kelas 9				
Jabatan	KLS	B	K	-/+
Analisis Pengembangan Usaha Agrindustri	7	1	1	0
Analisis Industri Dan Pencegahan Pencemaran	7	0	1	-1
Analisis Proses Uji Banding	7	1	2	-1
		2	4	-2
Kepala Seksi Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Dan Elektronika Kelas 9				
Jabatan	KLS	B	K	-/+
Analisis Teknologi Industri	7	2	2	0
Pengelola Sarana Perindustrian	6	1	1	0
Analisis Proses Uji Komparasi	7	1	1	0
		4	4	0

Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Kelas 11				
Kepala Seksi Bina Pasar Dan Distribusi Kelas 9				
Jabatan	KLS	B	K	-/+
Analisis Pengembangan Pasar	7	1	1	0
Penyusun Rencana Analisis Pasar Dalam Negeri	7	1	2	-1
Pengadministrasi Pengamanan dan Perlindungan Akses Pasar	5	1	1	0
		3	4	-1
Kepala Seksi Perlindungan Konsumen Dan Pengawasan Barang Kelas 8				
Jabatan	KLS	B	K	-/+
Analisis Mutu Produk	7	0	1	-1
Pengelola Fasilitas Dan Mediasi Perlindungan Konsumen	6	0	1	-1
		0	2	-2
Kepala Seksi Bina Usaha Dan Pelaku Distribusi Kelas 8				
Jabatan	KLS	B	K	-/+
Pengelola Distribusi Dan Pemasaran	6	0	1	-1
Penyusun Rencana Jaringan Distribusi	7	0	1	-1
		0	2	-2

Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri Kelas 11				
Kepala Seksi Ekspor Dan Impor Kelas 8				
Jabatan	KLS	B	K	-/+
Analisis Perdagangan	7	0	1	-1
Pengelola Fasilitas Dan Mediasi Pembangunan Usaha Perdagangan Ekspor-Impor	6	0	1	-1
		0	2	-2
Kepala Seksi Promosi Dan Pengembangan Perdagangan Internasional Kelas 9				
Jabatan	KLS	B	K	-/+
Fasilitator Promosi	7	0	1	-1
Penyusun Rencana Analisis Pasar Luar Negeri	7	1	1	0
		1	2	-1
Kepala Seksi Kerjasama Perdagangan Luar Negeri Kelas 9				
Jabatan	KLS	B	K	-/+
Penyusun Rencana Informasi Pasar Luar Negeri	7	0	1	-1
Analisis Kerjasama Bilateral Dan Regional	7	3	3	0
		3	4	-1

Kepala Bidang Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kelas 11				
Kepala Seksi Bina Lembaga Koperasi Dan UKM, Restrukturisasi Dan Pengawasan Kelas 9				
Jabatan	KLS	B	K	-/+
Analisis Pengawasan	7	2	2	0
Analisis Koperasi	7	1	1	0
		3	3	0
Kepala Seksi Fasilitas Pembiayaan Dan Permodalan Kelas 9				
Jabatan	KLS	B	K	-/+
Pengelola Permodalan Koperasi Dan Usaha Kecil, Mikro Dan Menengah	6	0	1	-1
Analisis Kerjasama Dan Permodalan	7	1	1	0
		1	2	-1
Kepala Seksi Produksi Usaha Dan Pemasaran Kelas 9				
Jabatan	KLS	B	K	-/+
Analisis Pemasaran Dan Kerjasama	7	1	1	0
Fasilitator Kewirausahaan	7	1	1	0
		2	2	0

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,


IRIANTO LAMBRIE

PETA JABATAN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN USAHA KECIL MENENGAH

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah
Kelas 15

Beban Kerja:
1. ...
2. ...

Rekapitulasi	Jumlah		
	B	K	+/-
Eselon II	1	1	0
Eselon III	5	5	0
Eselon IV	34	15	-1
JFT	4	6	-2
JFU	33	52	-19
Kurang	57	79	-22

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 70 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR
96 TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN
KERJA PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN
USAHA KECIL MENENGAH

Jabatan	KLS	B	K	+/-
Penguji Mutu Barang Pertama	8	4	4	0
Pengawas Koperasi Pertama	8	0	2	-2
		4	6	-2

Sekretaris Kelas 12				
Kepala Sub Bagian Perencanaan Kelas 9				
Jabatan	KLS	B	K	+/-
Analisis Perencanaan	7	1	1	0
Pengolah Data Perencanaan Penganggaran	6	0	1	-1
Analisis Data dan Informasi	7	1	1	0
		2	3	-1
Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian Kelas 9				
Jabatan	KLS	B	K	+/-
Pengadministrasi Kepegawaian	5	0	1	-1
Pengadministrasi Umum	5	2	2	0
Pengemudi	3	0	1	-1
Analisis Barang Milik Negara	7	1	1	0
		3	5	-2
Kepala Sub Bagian Keuangan Kelas 9				
Jabatan	KLS	B	K	+/-
Bendahara	7	1	2	-1
Verifikator Keuangan	6	1	2	-1
Pengadministrasi Keuangan	5	2	2	0
Pranata Laporan Keuangan	6	0	1	-1
Analisis Pengelolaan Keuangan	7	2	2	0
		6	9	-3

Kepala Bidang Industri Kelas 11				
Kepala Seksi Industri Kecil Dan Menengah Kelas 9				
Jabatan	KLS	B	K	+/-
Analisis Proses Akreditasi Industri	7	2	2	0
Pengelola Sarana Perindustrian	6	0	1	-1
Analisis Proses Akreditasi Lembaga Sertifikasi Produk, Personel, Halal, Pangan Organik	7	1	1	0
		3	4	-1
Kepala Seksi Industri Agro Dan Kimia Kelas 9				
Jabatan	KLS	B	K	+/-
Analisis Pengembangan Usaha Agraindustri	7	1	1	0
Analisis Industri Dan Pencegahan Pencemaran	7	0	1	-1
Analisis Proses Uji Banding	7	1	2	-1
		2	4	-2
Kepala Seksi Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Dan Elektronika Kelas 9				
Jabatan	KLS	B	K	+/-
Analisis Teknologi Industri	7	2	2	0
Pengelola Sarana Perindustrian	6	1	1	0
Analisis Proses Uji Komparasi	7	1	1	0
		4	4	0

Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Kelas 11				
Kepala Seksi Bina Pasar Dan Distribusi Kelas 9				
Jabatan	KLS	B	K	+/-
Analisis Pengembangan Pasar	7	1	1	0
Penyusun Rencana Analisis Pasar Dalam Negeri	7	1	2	-1
Pengadministrasi Penganaman dan Perlindungan Akses Pasar	5	1	1	0
		3	4	-1
Kepala Seksi Perlindungan Konsumen Dan Pengawasan Barang Kelas 8				
Jabatan	KLS	B	K	+/-
Analisis Mutu Produk	7	0	1	-1
Pengelola Fasilitas Dan Mediasi Perlindungan Konsumen	6	0	1	-1
		0	2	-2
Kepala Seksi Bina Usaha Dan Peleku Distribusi Kelas 8				
Jabatan	KLS	B	K	+/-
Pengelola Distribusi Dan Pemasaran	6	0	1	-1
Penyusun Rencana Jaringan Distribusi	7	0	1	-1
		0	2	-2

Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri Kelas 11				
Kepala Seksi Ekspor Dan Impor Kelas 8				
Jabatan	KLS	B	K	+/-
Analisis Perdagangan	7	0	1	-1
Pengelola Fasilitas Dan Mediasi Pembangunan Usaha Perdagangan Ekspor-Impor	6	0	1	-1
		0	2	-2
Kepala Seksi Promosi Dan Pengembangan Perdagangan Internasional Kelas 9				
Jabatan	KLS	B	K	+/-
Fasilitator Promosi	7	0	1	-1
Penyusun Rencana Analisis Pasar Luar Negeri	7	1	1	0
		1	2	-1
Kepala Seksi Kerjasama Perdagangan Luar Negeri Kelas 9				
Jabatan	KLS	B	K	+/-
Penyusun Rencana Informasi Pasar Luar Negeri	7	0	1	-1
Analisis Kerjasama Bilateral Dan Regional	7	3	3	0
		3	4	-1

Kepala Bidang Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kelas 11				
Kepala Seksi Bina Lembaga Koperasi Dan UKM, Restrukturisasi Dan Pengawasan Kelas 9				
Jabatan	KLS	B	K	+/-
Analisis Pengawasan	7	2	2	0
Analisis Koperasi	7	1	1	0
		3	3	0
Kepala Seksi Fasilitas Pembiayaan Dan Permodalan Kelas 9				
Jabatan	KLS	B	K	+/-
Pengelola Permodalan Koperasi Dan Usaha Kecil, Mikro Dan Menengah	6	0	1	-1
Analisis Kerjasama Dan Permodalan	7	1	1	0
		1	2	-1
Kepala Seksi Produksi Usaha Dan Pemasaran Kelas 9				
Jabatan	KLS	B	K	+/-
Analisis Pemasaran Dan Kerjasama	7	1	1	0
Fasilitator Kewirausahaan	7	1	1	0
		2	2	0

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,


IRIANTO LAMBRIE

1	DR. H. SURIANSYAH, M.AP	SEKRETARIS DAERAH
2	DIS. H. ZAINUDDIN HZ, M.Si	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
3	ARMAN JAUHARI, SH	PLT. KARO HUKUM
4	DIS. H. ABDUL MAQIUD S, M. Si	KARO ORGANISASI

PETA JABATAN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN USAHA KECIL MENENGAH

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 70 TAHUN 2019
TENTANG

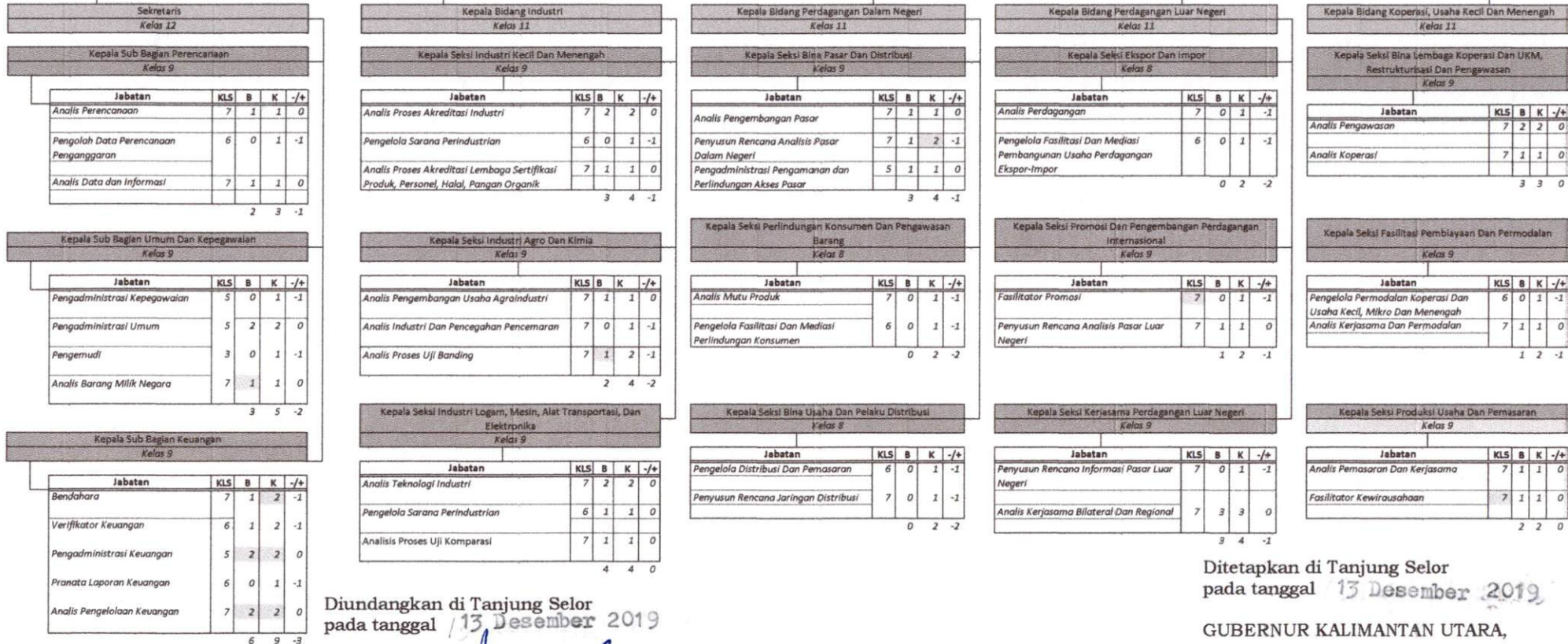
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 96 TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah
Kelas 15

Rekapitulasi	Jumlah		
	B	K	+/-
Eselon II	1	1	0
Eselon III	5	5	0
Eselon IV	14	15	-1
JFT	4	6	-2
JFU	33	52	-19
Kurang	57	79	-22

Beban Kerja:
1. ...
2. ...

Jabatan	KLS	B	K	-/+
Penguji Mutu Barang Pertama	8	4	4	0
Pengawas Koperasi Pertama	8	0	2	-2
		4	6	-2



Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

SURIANSYAH

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

PETA JABATAN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN USAHA KECIL MENENGAH

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah
kelas 15

Rekapitulasi	Jumlah		
	B	K	+/-
Eselon II	1	1	0
Eselon III	5	5	0
Eselon IV	34	15	-19
JFT	4	6	-2
JFU	33	52	-19
Kurang	57	79	-22

Beban Kerja:
1. ...
2. ...

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 70 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR
96 TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN
KERJA PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN
USAHA KECIL MENENGAH

Jabatan	KLS	B	K	-/+
Penguji Mutu Barang Pertama	8	4	4	0
Pengawas Koperasi Pertama	8	0	2	-2
		4	6	-2

Sekretaris
Kelas 12

Kepala Sub Bagian Perencanaan
Kelas 9

Jabatan	KLS	B	K	-/+
Analisis Perencanaan	7	1	1	0
Pengolah Data Perencanaan Penganggaran	6	0	1	-1
Analisis Data dan Informasi	7	1	1	0
		2	3	-1

Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
Kelas 9

Jabatan	KLS	B	K	-/+
Pengadministrasi Kepegawaian	5	0	1	-1
Pengadministrasi Umum	5	2	2	0
Pengemudi	3	0	1	-1
Analisis Barang Milik Negara	7	1	1	0
		3	5	-2

Kepala Sub Bagian Keuangan
Kelas 9

Jabatan	KLS	B	K	-/+
Bendahara	7	1	2	-1
Verifikator Keuangan	6	1	2	-1
Pengadministrasi Keuangan	5	2	2	0
Pranata Laporan Keuangan	6	0	1	-1
Analisis Pengelolaan Keuangan	7	2	2	0
		6	9	-3

Kepala Bidang Industri
Kelas 11

Kepala Seksi Industri Kecil Dan Menengah
Kelas 9

Jabatan	KLS	B	K	-/+
Analisis Proses Akreditasi Industri	7	2	2	0
Pengelola Sarana Perindustrian	6	0	1	-1
Analisis Proses Akreditasi Lembaga Sertifikasi Produk, Personel, Halal, Pangan Organik	7	1	1	0
		3	4	-1

Kepala Seksi Industri Agro Dan Kimia
Kelas 9

Jabatan	KLS	B	K	-/+
Analisis Pengembangan Usaha Agriindustri	7	1	1	0
Analisis Industri Dan Pencegahan Pencemaran	7	0	1	-1
Analisis Proses Uji Banding	7	1	2	-1
		2	4	-2

Kepala Seksi Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Dan Elektronika
Kelas 9

Jabatan	KLS	B	K	-/+
Analisis Teknologi Industri	7	2	2	0
Pengelola Sarana Perindustrian	6	1	1	0
Analisis Proses Uji Komparasi	7	1	1	0
		4	4	0

Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri
Kelas 11

Kepala Seksi Bina Pasar Dan Distribusi
Kelas 9

Jabatan	KLS	B	K	-/+
Analisis Pengembangan Pasar	7	1	1	0
Penyusun Rencana Analisis Pasar Dalam Negeri	7	1	2	-1
Pengadministrasi Pengamanan dan Perlindungan Akses Pasar	5	1	1	0
		3	4	-1

Kepala Seksi Perlindungan Konsumen Dan Pengawasan Barang
Kelas 8

Jabatan	KLS	B	K	-/+
Analisis Mutu Produk	7	0	1	-1
Pengelola Fasilitas Dan Mediasi Perlindungan Konsumen	6	0	1	-1
		0	2	-2

Kepala Seksi Bina Usaha Dan Peleku Distribusi
Kelas 8

Jabatan	KLS	B	K	-/+
Pengelola Distribusi Dan Pemasaran	6	0	1	-1
Penyusun Rencana Jaringan Distribusi	7	0	1	-1
		0	2	-2

Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri
Kelas 11

Kepala Seksi Ekspor Dan Impor
Kelas 8

Jabatan	KLS	B	K	-/+
Analisis Perdagangan	7	0	1	-1
Pengelola Fasilitas Dan Mediasi Pembangunan Usaha Perdagangan Ekspor-Impor	6	0	1	-1
		0	2	-2

Kepala Seksi Promosi Dan Pengembangan Perdagangan Internasional
Kelas 9

Jabatan	KLS	B	K	-/+
Fasilitator Promosi	7	0	1	-1
Penyusun Rencana Analisis Pasar Luar Negeri	7	1	1	0
		1	2	-1

Kepala Seksi Kerjasama Perdagangan Luar Negeri
Kelas 9

Jabatan	KLS	B	K	-/+
Penyusun Rencana Informasi Pasar Luar Negeri	7	0	1	-1
Analisis Kerjasama Bilateral Dan Regional	7	3	3	0
		3	4	-1

Kepala Bidang Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
Kelas 11

Kepala Seksi Bina Lembaga Koperasi Dan UKM, Restrukturisasi Dan Pengawasan
Kelas 9

Jabatan	KLS	B	K	-/+
Analisis Pengawasan	7	2	2	0
Analisis Koperasi	7	1	1	0
		3	3	0

Kepala Seksi Fasilitas Pembiayaan Dan Permodalan
Kelas 9

Jabatan	KLS	B	K	-/+
Pengelola Permodalan Koperasi Dan Usaha Kecil, Mikro Dan Menengah	6	0	1	-1
Analisis Kerjasama Dan Permodalan	7	1	1	0
		1	2	-1

Kepala Seksi Produksi Usaha Dan Pemasaran
Kelas 9

Jabatan	KLS	B	K	-/+
Analisis Pemasaran Dan Kerjasama	7	1	1	0
Fasilitator Kewirausahaan	7	1	1	0
		2	2	0

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



SURIANSYAH

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

No.	NAMA	JABATAN	PARAF
1	Drs.H. ZAINUDDIN H2,MSi	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
2	ARMAN JAUHARI, SH	Plt. KARO HUKUM	
3	Drs.H. ABDUL MAQJID S,MSi	KARO ORGANISASI	